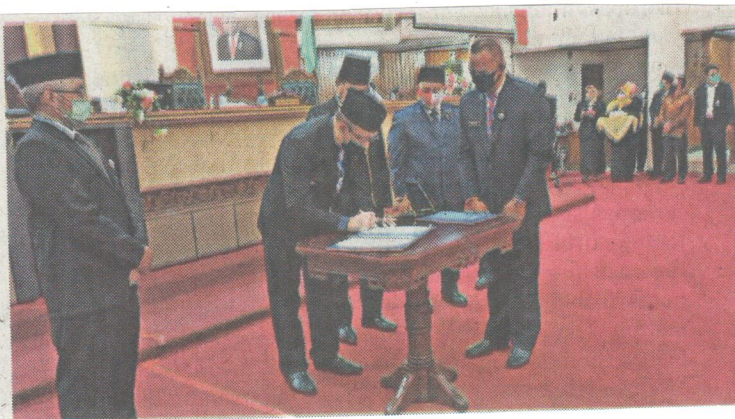




Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

ISTIMEWA
TANDATANGAN
 – Gubernur Kalbar Sutarmidji menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Pemprov Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, menerima seluruhnya temuan dan re-

komendasi dari BPK RI. Dia menilai pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2019 telah dilakukan secara cermat, teliti dan objektif oleh BPK RI, serta mengacu pada standar pemeriksaan komperhensif yang dapat dipertanggungjawabkan.

“InsyaAllah sebelum 60 hari kita sudah menyelesaikan tindak lanjut temuan dan rekomendasi itu,” kata

• **Baca Halaman 15**



Hal 9 ■ pemprov kalbar

Sutarmidji.

Menurut dia, rekomendasi dari BPK RI merupakan bahan perbaikan pelaksanaan ke depan, sebagai wujud komitmen transparansi Pemprov Kalbar dalam upaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Masih banyak temuan atau kesalahan, bahkan dilakukan oleh yang sudah pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala SKPD. Sutarmidji berharap agar kedepan tidak terjadi kesalahan dan temuan yang sama lagi.

“Saya berharap, nanti tindak lanjutnya harus terus berkoordinasi dengan BPK RI terutama untuk pencatatan aset secara baik.” imbuhnya.

Dijelaskan Sutarmidji setiap tahunnya masalah WTP ini masih sama. Walaupun WTP, masih ada catatan dari BPK RI. Dia mengaku sempat menegur kepada OPD yang tidak bisa membedakan mana belanja modal dan mana belanja barang.

“Itu harusnya tak boleh salah, bahkan Bappeda bisa salah, bagaimana tuh kualitas Bappeda saja bisa salah dalam hal itu. Kemudian ada kelebihan bayar, ini menunjukkan konsultan pengawasan tak betul,” kesal Midji.

Untuk itu, ke depan banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti hibah harus dirapikan. Dia mewanti-wanti jangan sampai nanti SPJ-nya tidak ada. Maksudnya kata dia

hibah untuk pembangunan rumah ibadah selalu dikeluarkan awal tahun, agar pertanggungjawaban sesuai.

Diakui Sutarmidji masih ada juga Rp1 miliar lebih yang belum, dia berjanji akan umumkan satu persatu melalui media, supaya ada transparansinya. Kemudian mengenai aset dia juga akan membenahinya menurutnya banyak aset yang tidak dipakai tapi masih dicatat.

“Misalnya yang sudah tidak ada kaki, masih aja tercatat tidak dimusnahkan, barang yang nilainya ekonomisnya tidak ada masih tercatat, kadang barangnya tak ada tapi tercatat, harusnya kalau hilang laporkan hilang. Itu yang harus dienehkan.

nah kemudian kendaraan roda dua lelangnya tahun ini tak laku, tahun depan lagi sampai lama-lama, garasi ndak bisa dipakai saking banyaknya, harusnya ada jalan lain, kalau memang nilainya terlalu tinggi, turunkan. jadi kerjanya harus cepat,” tegasnya.

Kemudian kesalahan yang lalu mengenai gaji yang harusnya 14 bulan, malah dianggarkan 11 bulan. Ada juha bagi hasil pajak potensinya sudah jelas, kemudian diturunkan, yang berdampak pada kabupaten/kota. kolaps tuh kab/kota.

“Saya inginnya, kita pertanggungjawaban keuangan negara itu harus transparanlah, penyajiannya harus benar.” tutupnya. (iat)